

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelaksanaan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, perlu melakukan penyesuaian terhadap nama jabatan dan kelas jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - bahwa kelas jabatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1824) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Reputblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1226) sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja saat ini, sehingga perlu diubah;

berdasarkan bahwa pertimbangan sebagaimana c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 273);
- 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1824) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Berita Negara Reputblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1226);
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas di Lingkungan Kementerian Jabatan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1824), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri tentang Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1226), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1824), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pembangunan Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1226) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (2)Pegawai yang dilantik berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564), diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang tercantum dalam Lampiran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak saat pelantikan.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Jabatan Administrator yang disetarakan berdasarkan kebijakan Pemerintah ke dalam Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya diberikan Kelas Jabatan 13 (tiga belas).
- (2) Jabatan Pengawas yang disetarakan berdasarkan kebijakan Pemerintah ke dalam Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda diberikan Kelas Jabatan 11 (sebelas).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,

ttd. SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1785

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN MENTERI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL

A. DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
1	Menteri PPN/Kepala Bappenas	Tanpa Kelas
2	Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas	17
3	Deputi Bidang Ekonomi	17
4	Deputi Bidang Pengembangan Regional	17
5	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	17

6	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	17
7	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	17
8	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	17
9	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	17
10	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	17
11	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	17
12	Inspektorat Utama	17
13	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	16
14	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	16
15	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	16
16	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	16
17	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	16
18	Staf Khusus Menteri	16
19	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan	15
20	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15
21	Kepala Biro Hukum	15
22	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	15
23	Kepala Biro Umum	15
24	Direktur Perencanaan Makro Dan Analisis Statistik	15
25	Direktur Keuangan Negara Dan Analisis Moneter	15
26	Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara	15
27	Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	15
28	Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15
29	Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana	15
30	Direktur Pembangunan Daerah	15
31	Direktur Regional I	15
32	Direktur Regional II	15
33	Direktur Regional III	15
34	Direktur Pangan dan Pertanian	15
35	Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	15
L	ı	

36 37 38	Direktur Kelautan dan Perikanan Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	15 15
	Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	15
38		10
	Direktur Lingkungan Hidup	15
39	Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial	15
40	Direktur Ketenagakerjaan	15
41	Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	15
42	Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi	15
43	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat	15
44	Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek	15
45	Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	15
46	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	15
47	Direktur Pengairan dan Irigasi	15
48	Direktur Transportasi	15
49	Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika	15
50	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	15
51	Direktur Perumahan dan Permukiman	15
52	Direktur Politik dan Komunikasi	15
53	Direktur Aparatur Negara	15
54	Direktur Hukum dan Regulasi	15
55	Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	15
56	Direktur Pertahanan dan Keamanan	15
57	Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan	15
58	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan	15
59	Direktur Kerjasama Pendanaan Bilateral	15
60	Direktur Kerjasama Pendanaan Multilateral	15
61	Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan	15
62	Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	15
	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian	

64	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	15
65	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan	15
66	Inspektur Bidang Administrasi Umum	15
67	Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan	15
68	Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	15
69	Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	15
70	Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja	15
71	Kepala Bagian Persidangan dan Protokol	13
72	Kepala Bagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Rumah Tangga	13
73	Kepala Bagian Program dan Tata Usaha	13
74	Kepala Subbagian Persidangan	11
75	Kepala Subbagian Protokol	11
76	Kepala Subbagian Perlengkapan	11
77	Kepala Subbagian Rumah Tangga	11

B. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU, JABATAN PELAKSANA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Perencana Ahli Utama	14	
2	Perencana Ahli Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan
	- 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12	
3	Perencana Ahli Muda	11	Hasil penyetaraan jabatan
	1 or orroadia rimir irrada	10	
4	Perencana Ahli Pertama	9	
5	Auditor Ahli Utama	14	
6	Auditor Ahli Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan

		12	
		11	Hasil penyetaraan jabatan
7	Auditor Ahli Muda	10	1 3 3
8	Auditor Ahli Pertama	9	
9	Auditor Penyelia	9	
	Auditor Pelaksana Lanjutan/		
10	Mahir	7	
11	Auditor Pelaksana/ Terampil	6	
12	Analis Kebijakan Ahli Utama	14	
13	Analis Kebijakan Ahli Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan
15	Mians Kenjakan Aim Madya	12	
14	Analis Kebijakan Ahli Muda	11	Hasil penyetaraan jabatan
14	Alians Kebijakan Alin Muda	10	
15	Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	
16	Analia Vanagarraian Madra	13	Hasil penyetaraan jabatan
10	Analis Kepegawaian Madya	11	
17	Analia Vanagarraian Mada	11	Hasil penyetaraan jabatan
17	Analis Kepegawaian Muda	9	
18	Analis Kepegawaian Pertama	8	
19	Analis Kepegawaian Penyelia	8	
20	Analis Kepegawaian Pelaksana	7	
	Lanjutan/ Mahir	•	
21	Analis Kepegawaian Pelaksana/	6	
00	Terampil	10	
22	Widyaiswara Ahli Utama	13	
21	Widyaiswara Ahli Madya	11	
22	Widyaiswara Ahli Muda	9	
23	Widyaiswara Ahli Pertama	8	
24	Analis Hukum Ahli Utama	13	TT 11
25	Analis Hukum Ahli Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan
		11	
26	Analis Hukum Ahli Muda	11	Hasil penyetaraan jabatan
		9	
27	Analis Hukum Ahli Pratama	8	
28	Perancang Peraturan Perundang-	15	
	undangan Ahli Utama		

undangan Ahli Madya 13 Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda 11 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Madya 32 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 33 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 34 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 35 Pranata Keuangan APBN Penyelia Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 40 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 41 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 42 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 43 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana APBN Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula Pranata Kubungan Masyarakat Pelaksana Pemula Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula Pranata Komputer Utama 13 Hasil penyetaraan jabatan Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Panata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula Pranata Komputer Utama 13 Hasil penyetaraan jabatan Hasil penyetaraan jabatan Hasil penyetaraan jabatan Hasil penyetaraan jabatan Ahli Panata Hubungan Masyarakat Pelaksana Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula Pranata Komputer Utama 13 Hasil penyetaraan jabatan Hasil Penyetaraan jabatan Panata Hubungan Masyarakat Pelaksana Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula Pranata Komputer Utama 13 14 15 16 17 18 18 19 19 10 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19 19 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10		Perancang Peraturan Perundang-	13	Hasil penyetaraan jabatan
Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda 11 Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama 32 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Madya 33 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 34 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 35 Pranata Keuangan APBN Penyelia 36 Pranata Keuangan APBN Penyelia 37 Pranata Keuangan APBN Mahir 38 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya 39 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 40 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 41 Ahli Madya 42 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 43 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 44 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 45 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 46 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan 47 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 48 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 49 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 40 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 41 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 42 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 43 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 44 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	29			114611 porty ocaracii jasaccari
30 undangan Ahli Muda1131 Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama932 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Madya13Hasil penyetaraan jabatan33 APBN Muda10Hasil penyetaraan jabatan34 APBN Muda10Hasil penyetaraan jabatan35 Pranata Keuangan APBN Penyelia9Panata Keuangan APBN Mahir36 Pranata Keuangan APBN Mahir8Panata Keuangan APBN Mahir37 Terampil7Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya1139 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama9Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama41 41 Ahli Madya13 11 11 11 12 13 14 14 15 16 17 17 17 18 19<				IIilti-ht
Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama	30			Hasil penyetaraan jabatan
31 undangan Ahli Pertama 9 32 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Madya 12 33 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 10 34 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 10 35 Panata Keuangan APBN Penyelia 9 36 Pranata Keuangan APBN Penyelia 9 37 Pranata Keuangan APBN Tarampil 7 38 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya 11 39 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 9 40 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 8 41 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11 42 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 11 42 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 8 43 Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 8 45 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan 7 46 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 6 47 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 6		_	11	
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Madya 12 33 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 10 34 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 10 35 Pranata Feuangan APBN Penyelia 36 Pranata Keuangan APBN Mahir Pranata Keuangan APBN Terampil 37 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 40 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 41 Ahli Madya 42 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 43 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 44 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 45 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	31		9	
APBN Madya APBN Madya 12 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 10 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 8 Franata Keuangan APBN Penyelia Pranata Keuangan APBN Mahir Pranata Keuangan APBN Mahir Pranata Keuangan APBN Terampil Pranata Keuangan APBN Terampil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11 Hasil penyetaraan jabatan Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 41 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 42 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 43 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 44 Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula		undangan Ahli Pertama		
APBN Madya Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 10 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 10 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 8 Franata Keuangan APBN Penyelia Pranata Keuangan APBN Mahir 7 Terampil 7 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11 Hasil penyetaraan jabatan Alli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat	32	Analis Pengelolaan Keuangan	13	Hasil penyetaraan jabatan
APBN Muda Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama Franata Keuangan APBN Penyelia Pranata Keuangan APBN Mahir Pranata Keuangan APBN Mahir Pranata Keuangan APBN Terampil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula		APBN Madya	12	
APBN Muda Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 35 Pranata Keuangan APBN Penyelia 9 36 Pranata Keuangan APBN Mahir 8 37 Pranata Keuangan APBN Mahir 38 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya 9 9 9 9 9 9 11 11 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 19 19 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	33	Analis Pengelolaan Keuangan	11	Hasil penyetaraan jabatan
APBN Pertama 35 Pranata Keuangan APBN Penyelia 9 36 Pranata Keuangan APBN Mahir 8 Pranata Keuangan APBN Mahir 7 Terampil 7 38 Pengelola Pengadaan 11 Barang/Jasa Madya 9 Pengelola Pengadaan 9 Barang/Jasa Muda 9 Pengelola Pengadaan 8 Barang/Jasa Pertama 8 40 Pengelola Pengadaan 8 Barang/Jasa Pertama 11 41 Ahli Madya 11 42 Pranata Hubungan Masyarakat 11 Hasil penyetaraan jabatan Ahli Muda 9 43 Pranata Hubungan Masyarakat 11 Hasil penyetaraan jabatan 41 Ahli Pertama 8 44 Pranata Hubungan Masyarakat 8 45 Pranata Hubungan Masyarakat 7 Pelaksana Lanjutan 7 46 Pranata Hubungan Masyarakat 6 Pranata Hubungan Masyarakat 7 Pelaksana Penula 6 Pranata Hubungan Masyarakat 6	33	APBN Muda	10	
APBN Pertama 35 Pranata Keuangan APBN Penyelia 9 36 Pranata Keuangan APBN Mahir 8 37 Pranata Keuangan APBN 7 Terampil 7 38 Pengelola Pengadaan 11 39 Pengelola Pengadaan 9 Barang/Jasa Madya 9 Pengelola Pengadaan 9 Barang/Jasa Muda 9 40 Pengelola Pengadaan 8 Barang/Jasa Pertama 8 41 Pranata Hubungan Masyarakat 13 Hasil penyetaraan jabatan Ahli Madya 11 42 Pranata Hubungan Masyarakat 11 Hasil penyetaraan jabatan Ahli Muda 9 43 Pranata Hubungan Masyarakat 8 44 Pranata Hubungan Masyarakat 8 45 Pranata Hubungan Masyarakat 7 Pelaksana Lanjutan 7 Pranata Hubungan Masyarakat 6 Pranata Hubungan Masyarakat 7 Pelaksana Penula 6 Pranata Hubungan Masyarakat 6	24	Analis Pengelolaan Keuangan	0	
Pranata Keuangan APBN Mahir 8 Pranata Keuangan APBN Mahir 7 7	34	APBN Pertama	0	
Pranata Keuangan APBN Terampil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	35	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	
Terampil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	36	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	
Terampil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	27	Pranata Keuangan APBN	7	
Barang/Jasa Madya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	37	Terampil	1	
Barang/Jasa Madya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	20	Pengelola Pengadaan	11	
Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	36	Barang/Jasa Madya		
Barang/Jasa Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	30	Pengelola Pengadaan	0	
Barang/Jasa Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula		Barang/Jasa Muda	,	
Barang/Jasa Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	40	Pengelola Pengadaan	8	
Ahli Madya Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula		Barang/Jasa Pertama)	
Ahli Madya Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 43 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 44 Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 6	41	Pranata Hubungan Masyarakat	13	Hasil penyetaraan jabatan
Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula		Ahli Madya	11	
Ahli Muda 9 Pranata Hubungan Masyarakat 8 Ahli Pertama 8 Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 7 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan 6 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Penula 6 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 6	40	Pranata Hubungan Masyarakat	11	Hasil penyetaraan jabatan
Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	42	Ahli Muda	9	
Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 6	4.0	Pranata Hubungan Masyarakat	0	
Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 8 6 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	43	Ahli Pertama	8	
Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 6	11	Pranata Hubungan Masyarakat	0	
Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 7 6 Palaksana 6	44	Penyelia	ð	
Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula Pelaksana Pemula	15	Pranata Hubungan Masyarakat	7	
46 Pelaksana 6 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 6	73	Pelaksana Lanjutan	,	
Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 6	46	Pranata Hubungan Masyarakat	6	
Pelaksana Pemula 6		Pelaksana		
Pelaksana Pemula	47	Pranata Hubungan Masyarakat	6	
48 Pranata Komputer Utama 13		Pelaksana Pemula		
	48	Pranata Komputer Utama	13	

10		13	Hasil penyetaraan jabatan
49	Pranata Komputer Madya	11	
50	D 1 17 1 1	11	Hasil penyetaraan jabatan
50	Pranata Komputer Muda	9	
51	Pranata Komputer Pertama	8	
52	Pranata Komputer Penyelia	8	
51	Pranata Komputer Pelaksana	7	
31	Lanjutan/ Mahir	,	
52	Pranata Komputer Pelaksana/	6	
	Terampil		
53	Arsiparis Utama	13	
54	Arsiparis Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan
	Thospario Maaya	11	
55	Arsiparis Muda	11	Hasil penyetaraan jabatan
33	Arsiparis Muda	9	
56	Arsiparis Pertama	8	
57	Arsiparis Penyelia	8	
58	Arsiparis Pelaksana	7	
	Lanjutan/Mahir	,	
59	Arsiparis Pelaksana/Terampil	6	
60	Staf Perencana Tk. I	7	Pernah diangkat dalam
			jabatan
	Staf Perencana/ Calon Perencana		Belum pernah diangkat
61	Pertama/ Calon Arsiparis Ahli	6	dalam jabatan
	Pertama		
62	Calon Auditor Tingkat Ahli	6	
63	Calon Auditor Tingkat Terampil	4	
64	Tata Usaha Tk.I/	5	Gol. III/a ke atas
	Pengadministrasi Umum Tk. I		,
65	Teknisi Tk. I	5	Gol. III/a ke atas
66	Tata Usaha/ Pengadministrasi	4	Gol. II/a – II/d
	Umum/ Pengelola Keuangan		
67	Teknisi	4	Gol. II/a – II/d

68	Satpam	3	
69	Caraka	3	
70	Pengemudi	3	
71	Pramubakti	3	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati